SISTEM EKONOMI DAN PERBANKAN SYARIAH DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM

Jairin

Dosen STIS AL-ITTIHAD Bima

rienata_31@yahoo.com

Abstrak

Islam mengakui hak setiap individu sebagai pemilik atas apa yang diperolehnya melalui bekerja dalam pengertian yang seluas-luasnya, dan manusia berhak untuk mempertukarkan haknya itu dalam batas-batas yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Persyaratan-persyaratan dan batas-batas hak milik dalam Islam sesuai dengan kodrat manusia itu sendiri, yaitu dengan sistem keadilan dan sesuai dengan hak-hak semua pihak yang terlibat di dalamnya. Sedangkan di dalam sistem ekonomi kapitalis faktor kerja tidak diperhitungkan. Para buruh dianggap budak yang dapat dibayar seenaknya. Upah buruh ditentukan oleh bos/majikan. Karena kesulitan mendapatkan rizki, maka para buruh mau saja dibayar berapa saja, dibayar murah sekali pun. Sebaliknya, Islam justru memperhitungkan faktor kerja dan nilai tambah yang berkeadilan, sehingga system Ekonomi Islam mengaturnya secara berkeadilan dan menghindari eksploitasi.

Kata Kunci: *Islam, Ekonomi, Perbankan Syariah.*

Pendahuluan

Konsep dasar Islam adalah tauhid atau meng-Esa-kan Allah. Tauhid di bidang ekonomi adalah menempatkan Allah swt sebagai Sang Maha Pemilik yang selalu hadir dalam tiap nafas kehidupan manusia muslim. Dengan menempatkan Allah sebagai satu-satunya Pemilik maka otomatis manusia akan ditempatkan sebagai pemilik "hak guna pakai" yang bersifat sementara terhadap harta yang dimilikinya. Dengan demikian realitas kepemilikan mutlak oleh manusia tidak dibenarkan dalam Islam, sebab hal ini berarti mengingkari tauhid atau istilah lainnya melakukan syirik-Pengaturan, dan orangnya disebut musyrik-Pengaturan. Padahal syirik itu merupakan dosa yang paling besar. Dalam Al-Quran Disebutkan "Inna syirka la-dzulmun `adzim" (sesungguhnya syirik itu merupakan dosa yang paling besar).¹

¹ Ismail Raji al-Faruqi, *Menumbuhkan Kekuatan Ekonomi Ummat Melalui Pembangunan Lembaga Keuangan Syari'ah* (Bandung: Dunia Ilmu, 2002), 205.

Islam memang mengakui hak setiap individu sebagai pemilik atas apa yang diperolehnya melalui bekerja dalam pengertian yang seluas-luasnya, dan manusia berhak untuk mempertukarkan haknya itu dalam batas-batas yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Persyaratan-persyaratan dan batas-batas hak milik dalam Islam sesuai dengan kodrat manusia itu sendiri, yaitu dengan sistem keadilan dan sesuai dengan hak-hak semua pihak yang terlibat di dalamnya. Sedangkan di dalam sistem ekonomi kapitalis faktor kerja tidak diperhitungkan. Para buruh dianggap budak yang dapat dibayar. Bahkan dibayar murah sekali pun para buru menerima dengan ikhlas upah yang diberikan Bos Perusahaan. Sebaliknya, Islam justru memperhitungkan faktor kerja dan nilai tambah yang berkeadilan, sehingga sistem ekonomi Islam mengaturnya secara berkeadilan dan menghindari eksploitasi. Jadi, hak milik perorangan didasarkan atas kebebasan individu yang wajar dan kodrati, sedang kerjasama didasarkan atas kebutuhan dan kepentingan bersama. Menurut ajaran Islam, manfaat dan kebutuhan akan materi adalah untuk kesejahteraan seluruh umat manusia, bukan hanya untuk sekelompok manusia saja.²

Dalam ajaran Islam terdapat dua prinsip utama ekonomi, yakni: Pertama, tidak seorangpun atau sekelompok orang pun yang berhak mengeksploitasi orang lain; dan kedua, tidak ada sekelompok orang pun boleh memisahkan diri dari orang lain dengan tujuan untuk membatasi kegiatan ekonomi di kalangan mereka saja. Dengan demikian seorang muslim harus memiliki pemikiran bahwa kegiatan perekonomian pada akhirnya akan kembali berada di tangan Allah. Islam memandang umat manusia sebagai satu keluarga, maka setiap manusia adalah sama derajatnya di sisi Allah dan di depan hukum Islam. Untuk merealisasi kekeluargaan dan kebersamaan tersebut, harus ada kerjasama dan tolong menolong. Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama terhadap seluruh anggota masyarakat di muka hukum tidaklah ada artinya kalau tidak disertai dengan keadilan ekonomi yang memungkinkan setiap orang memperoleh hak atas sumbangannya terhadap masyarakat. Agar tidak ada eksploitasi yang dilakukan seseorang terhadap orang lain, maka Allah melarang umat Islam memakan hak orang lain.

Dalam Qs. Asy-Syu'ara ayat 183 Allah SWT berfirman: "Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan"³ Dengan komitmen Islam yang khas dan mendalam terhadap persaudaraan dan keadilan ekonomi, maka segala bentuk

²*Ibid.*

³Dalam Qs. Asy-Syu'ara ayat 183 Allah SWT berfirman: "Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan

kezaliman dalam perolehan harta bertentangan dengan Islam. Tentu saja makna adil di sini bukan semua orang harus mendapat upah yang sama tanpa memandang kontribusinya kepada masyarakat. Islam mentoleransi ketidaksamaan pendapatan sampai tingkat tertentu, karena setiap orang berbeda sifat, kemampuan, dan pelayanannya dalam masyarakat. Dalam Al-Quran disebutkan: “Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rizki...” (Qs. 16/al-Nahl: 71).⁴

Nilai-Nilai Syariah dalam Sistem Ekonomi Islam

Menurut Didin Hafidhuddin, sistem ekonomi Islam perlu dibangun atas dasar tiga nilai-nilai berikut:⁵

a. Nilai Tauhid

1. Keyakinan kepada Allah SWT sebagai pemberi rizki (Qs. 11/Hud: 6), pemberi dan pembuat aturan untuk kemaslahatan hidup umma tmanusia (Qs. 30/Ar-Rum: 30, sekaligus yang mewajibkan manusia untuk mencari rizki dan karunia-Nya (Qs. 67: 15) untuk kemudian dipertanggung-jawabkan kelak kemudian hari di hadapan-Nya.

b. Keadilan dan kesejahteraan bersama, menurut Prof. Abd. Mannan (2005:52) yakni:

1. Tidak boleh harta dikuasai kelompok tertentu saja (Qs. 59: 7).
2. Menghapuskan monopoli, kecuali oleh pemerintah, untuk bidang-bidang tertentu.
3. Menjamin hak dan kesempatan semua pihak untuk aktif dalam proses ekonomi, baik produksi, distribusi, sirkulasi maupun konsumsi.
4. Menjamin basic needs fulfillment (pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar hidup) setiap anggota masyarakat.
5. Melaksanakan amanah at-Takaaful al-Ijtima’i atau social economic security insurance di mana yang mampu menanggung dan membantu yang tidak mampu.
6. Jangan mengatakan sistem ekonomi syari’ah bila outputnya tidak bermanfaat bagi masyarakat/ummat.
7. Pengenaan kewajiban zakat. (Qs. 9/At-Taubat: 60; Qs. 30/Ar-Rum: 39).

c. Kebebasan dan tanggungjawab

⁴Dalam Qs. 16/al-Nahl: 71. Yang artinya Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rizki.

⁵Didin Hafidhuddin, *Dasar Hukum Ekonomi Islam* (Bandung: CV. Intan Perkasa, 2005), 32.

Dalam ekonomi Islam dikenal prinsip *Tsawabit* / تَبَاوُثْ (tetap dan pasti) dan *Mutaghayyirat* / تَارِيْعَتَمْ (variabel) untuk melaksanakan prinsip yang bias dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang memerlukan inovasi dan kreatifitas. Beberapa contoh prinsip:

- 1) Tidak boleh menipu dan berlaku curang (Qs. 83: 1-6 & al-Hadits).
- 2) Tidak boleh saling mendzalimi (Qs. 2/Al-Baqarah: 279).
- 3) Tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang haram dan bathil (Qs. 2/Al-Baqarah:188; Qs. 5/al-Maidah: 90-91).
- 4) Tidak boleh melakukan kegiatan riba, sebagaimana tercantum dalam Qs. 2/Al-Baqarah: 275-279).

Model Pengelolaan Ekonomi Syariah dalam Islam

Pada sisi yang lain, terdapat hal yang juga penting untuk dilakukan dalam memberdayakan dan membangun kekuatan ekonomi umat adalah dengan mengoptimalkan pengambilan dan pendistribusian zakat, infak dan shadaqah melalui lembaga yang amanah, transparan dan professional. Lembaga zakat ini (baik LAZ maupun BAZ) harus diisi oleh orang-orang yang memiliki kafaah syar'iyah dan kemampuan manajerial dan memiliki waktu yang cukup. Lembaga zakat ini harus memiliki program kerja yang jelas, data *muzakki* dan *mustahik* dan kesediaan untuk diaudit oleh auditor netral. Demikian pula wakaf, baik wakaf harta benda yang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan maupun wakaf dengan uang harus dioptimalkan pelaksanaannya. Secara empirik sudah dibuktikan bahwa wakaf memiliki peran dan fungsi yang kuat untuk membangun kekuatan ekonomi, seperti contoh di Bangladesh. Demikian pula untuk kepentingan dan kemajuan pendidikan seperti di Universitas Al-Azhar Kairo dan Lembaga-lembaga Pendidikan terkemuka di Indonesia. Adapun perbedaan antara Lembaga Keuangan Syari'ah (seperti Bank, dan Asuransi Syari'ah) dengan Lembaga Keuangan Konvensional. Akad dan aspek legalitas. Akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi, karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.⁶

Konsep Bank Islam (Bank Syari'ah) dalam Ekonomi Islam

Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syari'ah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan dan sebagainya. Namun, terdapat banyak perbedaan mendasar di antara keduanya. Menurut Didin Hafidhuddin, perbedaan itu

⁶Antoni Safi'i, *Sistem Manajemen Kineja Bank Syariah Dan Bank Konvensional* (Jakarta: Insan Permata Press. 2004), 79

menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja.⁷

1. Akad Dan Aspek Legalitas.

Dalam bank syari'ah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi, karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga yaumul qiyamah nanti. Setiap akad dalam perbankan syari'ah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya harus memenuhi ketentuan akad.

2. Lembaga Penyelesai Sengketa.

Berbeda dengan per-bank-an konvensional, pada perbank-an syari'ah jika terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dengan nasabahnya, maka kedua belah pihak tidak menyelesaikannya dengan peradilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai dengan tata cara dan hukum syari'ah. Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syari'ah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Mu'amalah Indonesia atau BAMUI yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.

3. Struktur Organisasi.

Bank Syari'ah dapat memiliki struktur yang sama dengan Bank Konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi. Tapi unsur yang amat membedakan antara bank syari'ah dengan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syari'ah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syari'ah.

4. Bisnis Dan Usaha Yang Dibiayai.

Dalam Bank Syari'ah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari saringan syari'ah. Karena itu bank syari'ah tidak akan mungkin membiayai usaha yang terkandung di dalamnya hal-hal yang diharamkan. Dalam perbank-an syari'ah suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok. Didin Hafidhuddin mengungkapkannya dalam pertanyaan-pertanyaan berikut: ⁸

- a) Apakah objek pembiayaan halal atau haram?
- b) Apakah proyek menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat?
- c) Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila?

⁷Didin Hafidhuddin, *Dasar Hukum Ekonomi Islam...*,92.

⁸ Didin Hafidhuddin, *Aliran Dana Bank Syariah* (Jakarta: Intan Press, 2005), 65.

- d) Apakah proyek berkaitan dengan perjudian?
- e) Apakah usaha itu berkaitan dengan industri senjata ilegal atau berorientasi pada pengembangan senjata pembunuh massal?
- f) Apakah proyek dapat merugikan syi'ar Islam, baik secara langsung atau tidak langsung?

5. Lingkungan Kerja Dan Corporate Culture.

Sebuah bank syari'ah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syari'ah. Dalam hal etika, misalnya sifat amanah harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik. Di samping itu karyawan bank syari'ah harus skillful dan professional (*fathonah*) dan mampu melaksanakan tugas secara team-work di mana informasi merata di seluruh fungsional organisasi. Demikian pula dalam hal *reward* dan *punishment*, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syari'ah. Selain itu cara berpakaian dan tingkah laku dari para karyawan merupakan cerminan bahwa mereka bekerja dalam sebuah lembaga keuangan yang membawa nama besar Islam, sehingga tidak ada aurat yang terbuka dan tingkah laku yang kasar. Demikian pula dalam menghadapi nasabah, akhlaq harus senantiasa terjaga. Nabi Muhammad Saw. mengatakan bahwa senyum adalah shadaqah. Adapun perbedaan antara Bank syari'ah dengan Bank Konvensional dapat diperhatikan dalam tabel pada halaman berikut:

Tabel. 1
Perbedaan Bank Syari`Ah Dengan Bank Konvensional

NO	BANK SYARI'AH/ISLAM	BANK KONVENSIONAL
1	Melakukan investasi-investasi yang halal Saja dan dikontrol oleh DPS	
2	Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa	Memakai perangkat bunga
3	Profit dan falah (keuntungan duniawi dan kebahagiaan akhirat) oriented	Profit Oriented
4	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur-debitur
5	Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan Fatwa Dewan Pengawas Syari'ah	Tidak terdapat dewan sejenis

*) Sumber data: Didin Hafidhuddin⁹

⁹Didin Hafidhuddin, *Dasar Hukum Ekonomi Islam...*,32.

Akan tetapi untuk mengetahui perbedaan kinerja antara bank Konfesional dengan bank Syariah, yang biasa masyarakat pahami yakni Bank konfesional di kenal dengan suku Bunga dan sedangkan Bank Syariah dikenal dengan Mudarabbah atau lebih dikenal dengan bagi hasil, dan adapun perbedaan antara Bunga Bank dengan system Bagi Hasil sebagai berikut:

Tabel. 2
Perbedaan Bunga Bank Dengan Bagi Hasil

No	BUNGA	BAGI HASIL
1	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada wakt akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
2	Besarnya presentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang Dipinjamkan	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
3	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak
4	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “booming”	Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
5	Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk Islam.	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

Penutup

Dalam ajaran Islam terdapat dua prinsip utama ekonomi, yakni: Pertama, tidak seorangpun atau sekelompok orang pun yang berhak mengeksploitasi orang lain; dan kedua , tidak ada sekelompok orang pun boleh memisahkan diri dari orang lain dengan tujuan untuk membatasi kegiatan ekonomi di kalangan mereka saja. Dengan demikian seorang muslim harus memiliki pemikiran bahwa kegiatan perekonomian pada akhirnya akan kembali berada di tangan Allah. Islam memandang

umat manusia sebagai satu keluarga, maka setiap manusia adalah sama derajatnya di sisi Allah dan di depan hukum Islam. Untuk merealisasi kekeluargaan dan kebersamaan tersebut, harus ada kerjasama dan tolong menolong. Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama terhadap seluruh anggota masyarakat di muka hukum tidaklah ada artinya kalau tidak disertai dengan keadilan ekonomi yang memungkinkan setiap orang memperoleh hak atas sumbangannya terhadap masyarakat. Agar tidak ada eksploitasi yang dilakukan seseorang terhadap orang lain, maka Allah melarang umat Islam memakan hak orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed Rifa'i. *Pendidikan dan Perubahan Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media, 2002.
- Amir hamzah. *Posmodernisme: Bahaya dan Harapan Bagi Islam, terjemahan*. Bandung. Intan Preest, 2009.
- Coombs, Philip H. *The World Crisis in Education: The View from The Eightie*. New York: Oxford University Press, 1985.
- Didin. *Menumbuhkan Kekuatan Ekonomi Ummat Melalui Pembangunan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Bandung. Dunia Ilmu, 2005.
- Direktorat Sekolah Swasta (Tanpa Tahun), *Sekolah Menengah Umum Plus: Informasi Singkat*, Jakarta: Direktorat Sekolah Swasta Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Hafidhuddin, Didin. *Menumbuhkan Kekuatan Ekonomi Ummat Melalui Pembangunan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta. CV. Kreatif Tinta, 2005.
- Karim, Adiwarmar Azwar *Implementasi Ekonomi Syari'ah di Indonesia*. Bogor. Tinta Aksara, 2005.
- Maududi, Abul A'la. *Khilafah dan Kerajaan: Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam*. Bandung. Cetakan Kedua, Bandung. Dunia Ilmu, 2003.
- Mizan, Muhammad. *Kepemilikan dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 2001.
- Rahmat, Munawar. *Aplikasi Nilai-nilai Religius dan Peningkatan Mutu Sekolah*. Malang. Intan Perkasa, 2002.
- Rizqullah. *Masa Depan Perbankan Syari'ah Indonesia*. Jakarta. CV. Pena Ilmu, 2005.

Syarif, Hidayat. *Peningkatan Kualitas SDM Menyongsong Era Globalisasi*.
Surabaya. Intan Perkasa, 2004.